

## KEBIJAKAN MONETER FISKAL DALAM PEREKONOMIAN

Luluk Masrufah  
[luluktamsel@gmail.com](mailto:luluktamsel@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

### ABSTRAK

Dalam kegiatan perekonomian pasti kenal akan dari kebijakan ekonomi dan kebijakan makro untuk lebih memahami akan hal itu, kita paparkan maksud dari keduanya. Kebijakan ekonomi ialah bentuk kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian dalam mengatasi akan permasalahan perekonomian contoh diantaranya pada penetapan sistem perpajakan, suku bunga, anggaran perintah dan lain- lain.

Sedangkan kebijakan makro ialah suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam semua aspek perekonomian di tingkat nasional. Ada dua macam kebijakan ekonomi diantaranya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan keduanya memiliki ciri, jenis, dan tujuan tersendiri tetapi saling keterkaitan satu sama lain dalam menguatkan perekonomian indonesia.

**Kata kunci :** Kebijakan, Ekonomi, Moneter, Fiskal

### ABSTRAK

*In economic activity, you must know about economic policy and macro policy. To better understand this, we will explain the meaning of both. .Economic policy is a form of policy or decision made by the government relating to economic activities in overcoming economic problems, for example in the determination of the tax system, interest rates, budget orders and others.*

*while macro policy is a form of government policy in all aspects of the economy at the national level. .There are two kinds of economic policies including monetary policy and fiscal policy and both have their own characteristics, types, and objectives but are interrelated with each other in strengthening the Indonesian economy.*

**Keywords :** Policy, Economy, Monetary.Fiscal

### Pendahuluan

Ilmu perekonomian ialah suatu ilmu yang mempelajari akan pengetahuan sosial yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian dalam kehidupan sehari-hari, Tujuannya agar setiap manusia mengetahui akan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu secara individu maupun kesatuan (organisasi). Kegiatan perekonomian negara selalu melibatkan pemerintah karena pemerintahlah yang memegang hak atau kuasa akan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan yang berada di negara tersebut.

Pemerintah negara memiliki kewajiban dalam kegiatan perekonomian yakni pemerintah pasti mempunyai kebijakan perekonomian yang dapat menjamin dalam menstabilkan kegiatan perekonomian negara yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara. Kebijakan perekonomian itu ada dua macam diantaranya yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang mana keduanya saling keterhubungan untuk mencapai tujuan perekonomian negara.

### **Pembahasan**

Kebijakan di dalam KBBI ialah bentuk rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak yang berkaitan dengan pemerintahan, organisasi, dan lain-lain.

Sedangkan Kebijakan Ekonomi ialah adanya suatu peraturan atau batasan – batasan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dibuat oleh pemerintah. Tujuannya tak lain ialah demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain kebijakan ekonomi dibutuhkan kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang berhubungan dengan permasalahan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Ada beberapa macam dari kebijakan ekonomi diantaranya :

1. Kebijakan Ekonomi Mikro yaitu bentuk kebijakan pemerintah yang dibuat untuk seluruh perusahaan dengan berbagai jenis kegiatan dari seluruh perusahaan yang ada.

2. Kebijakan Ekonomi Meso yaitu bentuk kebijakan ekonomi yang diperuntukkan hanya di wilayah dan sektor tertentu.

3. Kebijakan Ekonomi Makro yaitu bentuk kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan segala aspek kegiatan perekonomian pada tingkat nasional (agregat). Kebijakan makro ini lebih efektif jika dibandingkan dengan kebijakan mikro dan meso. dan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter.<sup>1</sup>

### **A. Kebijakan Moneter**

#### **1. Pengertian Kebijakan Moneter**

Kebijakan Moneter ialah suatu bentuk pengendalian dan pengarahan dalam kegiatan perekonomian makro ke kondisi atau situasi yang lebih baik

---

<sup>1</sup> Sadono Sukirno. Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2003.

dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Jika kondisi kegiatan perekonomian itu lebih baik maka meningkatlah output keseimbangan dan stabilitas harga bisa terkontrol dengan baik (inflasi terkontrol). Dengan kebijakan moneter pemerintah bisa mengatur dengan mempertahankan, menambah, atau bahkan mengurangi jumlah uang yang beredar demi pengendalian dan tak lain untuk mempertakankan kegiatan perekonomian baik itu dalam keadaan inflasi.

Kebijakan Moneter ialah bentuk tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter ( bank sentral ) demi pengaruh jumlah uang yang beredar dan juga kredit pada gilirannya yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian masyarakat. Tujuan utamanya ialah demi menstabilkan perekonomian yang bisa diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga dan juga neraca pembayaran internasional yang baik dan seimbang.

Prinsip dari kebijakan moneter ada dua macam diantaranya pengendalian permintaan (demand management) dan target moneter (monetary targety). Pengendalian permintaan berkaitan dengan pengendalian inflasi contoh melakukan penjagaan dan dipertahankan dalam permintaan uang, barang dan jasa agar mengurangi tingkat inflasinya. Dalam kebijakan moneter itu tertuju pada target pengendalian jumlah uang yang beredar. <sup>2</sup>

## **2. Intrument Kebijakan Moneter**

Instrumen utama kebijakan moneter ada tiga macam diantaranya : Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), Fasilitas Diskonto (Discount Rate), dan Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Di luar ketiga instrument tersebut pemerintah dapat melakukan imbauan moral (moral suation).

### **a) Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)**

Bentuk pengendalian pemerintah dengan menejual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (government securities).

### **b) Fasilitas Diskonto (Discount Rate)**

Bentuk pengendalian pemerintah dengan menetapkan tingkat bunga pada bank umum yang menjamin ke bank sentral. Karena dalam keadaan tertentu bank umum mengalami kekurangan uang yang menyebabkan bank umum meminjam

---

<sup>2</sup> MS Khusen, "Kebijakan Ekonomi(Moneter & Fiskal," *academia.edu* (n.d.), accessed September 16, 2021, [https://www.academia.edu/download/58097371/TUGAS\\_METLIT\\_ABSTRAK\\_1.pdf](https://www.academia.edu/download/58097371/TUGAS_METLIT_ABSTRAK_1.pdf).

pada bank sentral, dalam hal ini pemerintah mengambil manfaat dalam mengurangi dan menambah uang yang beredar.

c) Ketentuan Cadangan Minimum (reserve requirement)

Industri perbankan adalah salah satu industri terbanyak yang di atur oleh undang-undang. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah ketentuan cadangan minimum atau RR yang biasanya ditetapkan berdasarkan undang-undang perbankan yang di sahkan oleh dewan perwakilan rakyat.

Kebijakan cadangan minimum adalah suatu kebijakan bank sentral demi menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus di penuhi oleh bank umum, dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat.

d) Hibauan Moral ( Moral Situation )

Himbau moral digunakan bank sentral untuk mendorong institusi finansial agar cenderung berpihak kepada kepentingan publik. Biasanya bank sentral menggunakan himbauan moral untuk meyakinkan para banker dan menejer senior institusi finansial agar lebih memerhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek institusinya.<sup>3</sup>

### 3. Jenis Kebijakan Moneter

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro kebijakan moneter itu ada dua jenis yaitu moneter ekspansif dan moneter kontraktif. yang dimaksud kebijakan moneter ekspansif ialah bentuk kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar dan tindakan dilakukan pada saat munculnya *kontraksional gop*. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif ialah bentuk kebijakan dalam mengurangi jumlah uang yang beredar kebijakan moneter kontraktif ini lawan dari kebijakan moneter ekspansif. dikenal dengan istilah kebijakan uang ketat atau (*tight money policy*).

### 4. Tolak Ukur Stabilitas Moneter

Sebelum dilakukannya kebijakan moneter, pemerintah harus mempunyai target dan tolak ukur keberhasilannya. Seberapakah penting target dan tolak ukur tersebut itu sangat penting sebagai acuan apakah berhasil atau tidaknya. Ada

---

<sup>3</sup> P Warjiyo, *Kebijakan Moneter Di Indonesia*, 2017, accessed September 16, 2021, [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Y5rWDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+moneter+p+warjiyo&ots=E\\_t2ifSy-2&sig=j6usPwycZFtuXwLIGd2LtoHj1GY](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Y5rWDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+moneter+p+warjiyo&ots=E_t2ifSy-2&sig=j6usPwycZFtuXwLIGd2LtoHj1GY).

beberapa indikator yang digunakan dalam menilai suatu kebijakan moneter diantaranya:

a) Laju inflasi yang cukup rendah terkendali

Jika dalam perbankan laju inflasi yang tinggi itu berdampak buruk bagi perbankan alasannya karena jika laju inflasi tinggi maka bank akan mengalami kesulitan dalam menjalankan dana masyarakat, yang mana tingkat suku bunga riil (unga nominal inflasi) menurun, yang berakibatkan berkurangnya minat masyarakat dalam menyimpan dana dalam produk – produk padan bank.

b) Suku bunga pada tingkat yang wajar

Tingginya suku bunga memang ada dampak baiknya yaitu meningkatkan peminatana masyarakat dalam menyimpan dananya di bank, akan tetapi dari sisi lain ada dampak buruknya yaitu mengurangi peminatan masyarakat dibidang usaha dalam mengambil kredit untuk pengembangan usahanya. Yang mengakibatkan dana dibank semakin menumpuk banyak. dalam hal ini bank memuat tolak ukur dengan suku bunga yang sewajarnya agar bank tidak terancam masalah likuiditas.

c) Nilai tukar rupiah yang realistis

Kestabilan nilai tukar tentu akan lebih memberi iklim kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha dan masyarakat. Nilai tukar rupiah yang rendah saat ini dapat dijadikan saat yang baik dunia usaha yang berorientasi ekspor, dan ini dapat memicu peningkatan permintaan kredit dari dunia usaha untuk melanjutkan dan meningkatkan produk ekspornya.

d) Ekspektasi/harapan masyarakat terhadap moneter

Walaupun sulit untuk diukur, namun ekspektasi masyarakat mulai mendapat perhatian besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Ekspektasi umumnya terjadi melalui ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi akan mendorong semakin tingginya harga-harga, sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan diekspor. Sementara itu, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat

pada mata uang rupiah, sehingga dapat memicu mengalirnya dana masyarakat keluar negeri.

e) Jumlah Uang Beredar (JUB)

Dari kelima indikator sebelumnya, hanya JUB yang tidak bisa dimonitor dan dirasakan langsung oleh masyarakat, sementara itu indikator nomor 2 sampai dengan 5, relatif dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.<sup>4</sup>

### 5. Contoh Kebijakan Moneter Yang Dilakukan Pemerintah

adapun beberapa contoh kebijakan moneter diantaranya:

- Bank Indonesia melelang sertifikatnya, atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal.
- Jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di harapan, maka bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini akan membuat masyarakat melakukan pinjaman sehingga banyak investasi yang ada di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga akan dinaikkan, hal ini akan membuat masyarakat/pengusaha banyak menabung sehingga uang yang beredar dapat dikurangi.
- Pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga.
- Di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan pada saat terjadinya inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga.
- Jika sedang terjadi inflasi maka bank sentral akan menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar bisa dikurangi. Sebaliknya jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar akan bertambah akibat banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian akibat dari naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman akan berkurang atau bahkan bank

---

<sup>4</sup> Khusen, "Kebijakan Ekonomi(Moneter & Fiskal.)"

umum tidak mampu memberikan pinjaman, sehingga dana yang menganggur di bank akan semakin bertambah.<sup>5</sup>

## **B. Kebijakan Fiskal**

### **1. Pengertian Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal yaitu bentuk langkah pemerintah dalam mengelola terhadap pengeluaran dan perpajakan atau dalam penggunaan instrumen fiskal dalam mempengaruhi jalannya sistem ekonomi agar dapat maksimum dalam kesejahteraan ekonomi. Lebih umumnya kebijakan fiskal disebut sebagai pengelolaan anggaran pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian contohnya kebijakan dalam perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, dan yang mencakup dalam pemerintahan.<sup>6</sup>

### **2. Instrumen Kebijakan Fiskal**

Agar kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan beberapa instrumen fiskal untuk mencap tujuannya diantaranya:

1) anggaran belanja seimbang ialah bentuk anggaran yang berhubungan dengan keadaan dan kondisi perekonomian, yang mana fungsinya agar anggaran dapat seimbang dalam jangka panjang. Jika terjadi ketidak stabilan dalam perekonomian maka anggaran defisit yang digunakan, sedangkan anggaran surplus digunakan pada keadaan masa inflasi.

3) pengelolaan anggaran ialah bentuk upaya dalam memperkecil ketidak stabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran yang berkaitan dengan hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak.

4) pembiayaan fungsional ialah pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional yang berfungsi untuk peningkatan kesempatan kerja.<sup>7</sup>

### **3. Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal**

---

<sup>5</sup> Al Rafisqy, Zhafran Ghani. Pengertian, Macam, Contoh, serta Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter. [https://ekspektasia.com/kebijakan-fiskal-dan-moneter/#Instrumen\\_Kebijakan\\_Fiskal](https://ekspektasia.com/kebijakan-fiskal-dan-moneter/#Instrumen_Kebijakan_Fiskal). 2018. Diakses pada Desember 8 2021.

<sup>6</sup> Nurul Huda, dkk, Pendidikan Ekonomi Makro: *Pendekatan Teoritis*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008), h.175-176.

<sup>7</sup> F Ardiansyah - Kebijakan Fiskal and undefined 2020, "Kebijakan Fiskal," *eprints.umsida.ac.id* (n.d.), accessed September 16, 2021, <http://eprints.umsida.ac.id/7010/>.

Jenis kebijakan fiskal itu dibagi menjadi dua jika dari sudut ekonomi makro diantaranya:

1) kebijakan fiskal ekspansif ialah bentuk pengarahannya kebijakan ekonomi agar menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah disaat munculnya kontraksional gap ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran. Agar meningkatkan output melalui kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukanlah dengan menaikkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak.

2) kebijakan fiskal kontradiktif ialah bentuk kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan inflasi. Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak.<sup>8</sup>

#### **4. Tujuan Kebijakan Fiskal dan Moneter**

Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam menggerakkan aktifitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, pemerataan pendapatan. Akan tetapi, dampak kebijakan fiskal pada aktifitas ekonomi negara sangatlah luas. Berbagai indikator ekonomi lainnya pun mengalami perubahan sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Dampak kebijakan fiskal pada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif, sedangkan dampak pada inflasi diharapkan selalu negatif. Akan tetapi secara teori, kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber pajak, sebagai sumber keuangan utama pemerintah, akan mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.<sup>9</sup>

Peranan kebijakan fiskal dalam menstimulasi perekonomian menjadi perdebatan yang menghangat kembali, khususnya sejak krisis ekonomi melanda Negara-negara Asia seperti Indonesia, Korea, Thailand, dan Filipina, berlanjutnya resesi di Jepang, dan melemahnya perekonomian Amerika Serikat. Di Negara-negara Asia yang dilanda krisis pada khususnya, peranan kebijakan fiskal telah meningkat dalam mendukung pemulihan ekonomi, namun efektifitas stimulus fiskal untuk menggantikan pengeluaran swasta tetap dipertanyakan. Sebagaimana

---

<sup>8</sup> Khusein, "Kebijakan Ekonomi (Moneter & Fiskal)."

<sup>9</sup> Rahayu Ani, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).



negara membangun, pada umumnya, kebijakan fiskal yang dilaksanakan Indonesia adalah kebijakan fiskal ekspansif dengan instrumen anggaran deficit.

Pada dasarnya kebijakan fiskal yang ekspansif dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kelonggaran dana ke dalam masyarakat untuk mendorong perekonomian. Akan tetapi, kebijakan fiskal seringkali menjadi kurang efektif jika tidak didukung oleh situasi dan kondisi yang tepat serta kebijakan lain yang konsisten, bahkan tidak mustahil kebijakan stimulus fiskal justru dapat menghambat laju perekonomian. Misalkan, stimulus fiskal yang semestinya akan meningkatkan aggregate demand, namun bila tidak diimbangi kebijakan moneter yang akomodatif, justru dapat menyebabkan hasil yang kontra produktif.

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan agregat demand, pada akhirnya terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi, jika tidak hati-hati maka akan timbul inflasi. Selama ini Indonesia cenderung melakukan kebijakan fiskal yang ditunjukkan untuk mendorong perekonomian yang biasa dikenal dengan kebijakan anggaran yang longgar (*loose budget policy*), yang intinya berupa kenaikan rasio anggaran negara terhadap pendapatan nasional yang berupa kenaikan defisit anggaran atau penurunan surplus anggaran. Kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah kebijakan dalam melakukan defisit anggaran karena Indonesia perlu untuk membangun perekonomian yang lebih baik agar pendapatan nasional dan output produksi semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik. Namun, pada kebijakan defisit anggaran ini secara tahapan akan mempengaruhi pada APBN yang semakin tinggi angka defisitnya dan langkah yang dilakukan pemerintah adalah berhutang pada luar negeri. Dalam utang luar negeri memiliki tingkat bunga yang dalam dari tahun ke tahun. Jumlah utang tersebut akan semakin meningkat dan menambah utang negara jika tidak cepat-cepat dilakukan pembayaran dengan cepat.<sup>10</sup>

Tujuan kebijakan moneter adalah untuk pengendalian ekonomi secara makro agar tercipta kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah yang beredar. Dengan terkendalinya peredaran uang, inflasi bisa dikendalikan. Selain

---

<sup>10</sup> Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter, Teori dan Empirikal* (Jakarta: Kencana, 2011), h.5

pengaturan jumlah uang yang beredar, instrumen kebijakan moneter lainnya yakni penetapan suku bunga acuan dari bank sentral. Apabila kestabilan dalam kondisi perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter bisa digunakan untuk memulihkan atau stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali bakal dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian berlanjut pada sektor riil.<sup>11</sup>

### **5. Perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.**

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua kebijakan berkaitan dengan perekonomian negara yang sering kita dengar. Dua kebijakan ini berbeda, tapi punya peran yang sama, yaitu diterapkan untuk menstabilkan ekonomi negara yang terindikasi bermasalah. Dua kebijakan ini punya praktik yang berbeda, dan pemerintah negara bisa menjalankannya secara sekaligus. Kondisi perekonomian suatu negara yang tidak stabil akan memicu banyak masalah. Yang paling umum adalah tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, banyaknya pengangguran, perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan, bertambahnya utang negara, dan masalah-masalah lain. Namun, hal tersebut bisa memicu aksi besar seperti kerusuhan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Kita bisa mengambil contoh krisis moneter tahun 1998. Tentu hal tersebut harus segera diatasi jika tidak ingin terjadi kembali. Kebijakan fiskal memungkinkan negara untuk mengambil pajak secara merata dan adil. Tidak mengherankan mereka yang masuk ke dalam kategori warga negara yang penghasilannya di atas rata-rata akan dibebani oleh pajak yang lebih besar. Sementara itu, mereka yang tidak menjadi wajib pajak bisa merasakan secara tidak langsung kebijakan ini. Lalu, ada juga kebijakan moneter yang terkait dengan keuangan negara. Pemerintah tidak bisa sembarangan memproduksi uang secara asal-asalan. Jika terlalu banyak jumlah uang yang beredar, hal itu akan memicu masalah lain yang juga cukup merepotkan, yaitu inflasi. Sekarang, mari kita membahas kebijakan fiskal dan moneter satu per satu.<sup>12</sup>

#### **- Kebijakan Fisikal**

---

<sup>11</sup> M. Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, h.199.

<sup>12</sup> Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*, h.362

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan anggaran negara. Seperti yang telah kita ketahui negara menyusun anggaran yang didapatkan dari berbagai macam pemasukan. Salah satu penyumbang anggaran negara terbesar adalah pajak yang diambil dari seluruh elemen masyarakat yang dikategorikan sebagai wajib pajak. Jika ada yang merasa dirugikan karena penarikan pajak, sebenarnya ini adalah kewajiban yang akan kembali padamu walaupun secara tidak langsung. Selain pajak, kebijakan fiskal juga ada kaitannya dengan pengeluaran negara. Kebijakan ekonomi ini memang terbagi dari beberapa jenis kebijakan fiskal. Berikut ini adalah penjelasannya.<sup>13</sup>

1) Kebijakan Fiskal Defisit Merupakan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk memperbesar pengeluaran dibandingkan pemasukan. Pengeluaran yang sering dilakukan adalah dengan mengambil pinjaman di luar negeri. Kamu pasti mengingat pemerintah Indonesia cukup sering melakukan kebijakan seperti ini untuk berbagai keperluan di dalam negeri. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun kebijakan fiskal defisit sering dilakukan karena kemudahan mendapatkan pinjamannya. Sepertinya di dunia ini sangat jarang ada negara yang bebas utang.

2) Kebijakan Fiskal Surplus Kebijakan fiskal surplus dilakukan ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan jumlah pendapatan dibandingkan pengeluaran. Kebijakan seperti ini cukup jarang diambil karena dianggap kurang efektif untuk menstabilkan ekonomi. Hanya, kebijakan ini sangat cocok diterapkan ketika inflasi di dalam suatu negara menjadi tinggi. Untuk menurunkannya pemerintah melakukan tindakan preventif seperti meningkatkan pajak dalam negeri. Namun, kenyataannya meningkatkan pajak dalam negeri tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus melihat kemampuan membeli masyarakat juga.

---

<sup>13</sup>Anjayati, Himayani. 2015. Makalah Kebijakan, Moneter dan Fiskal, (<http://himayani.blogspot.co.id/2015/02/makalah-kebijakan-moneter-dan-fiskal.html>, diakses 17 September 2021).

3) Kebijakan Fiskal Seimbang Kebijakan ini menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran dalam negeri. Di sini pemerintah tidak perlu mengambil utang luar negeri sehingga tidak akan pertambahan utang. Cara ini cukup efektif untuk menstabilkan negara, tapi cara ini masih lebih jarang digunakan daripada kebijakan fiskal defisit. Mungkin karena dengan berhutang, negara lebih cepat mendapatkan bantuan karena kebutuhannya sudah mendesak. Perlu dilakukan analisis yang matang terlebih dahulu untuk memilih mana kebijakan yang akan digunakan. Seperti itulah penjelasan tentang kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Sekarang, kamu perlu mengetahui tentang kebijakan moneter. Seperti yang telah disebutkan diatas, kebijakan ini juga sering digunakan, bahkan jugadikombinasikan bersama kebijakan fiskal.

- Kebijakan moneter

Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter itu lebih berfokus pada masalah keuangan. Biasanya yang punya banyak andil di sini adalah Bank Indonesia karena lembaga tersebut yang paling punya wewenang untuk melakukan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut mencakup mengendalikan jumlah uang yang beredar, tingkat inflasi, nilai suku bunga, nilai bunga kredit, dan nilai tukar mata uang. Kebijakan moneter terbagi atas dua jenis yang dibedakan dari tujuan yang dicapainya. Di bawah ini adalah penjelasannya.<sup>14</sup>

1) Kebijakan Moneter Ekspansif Kebijakan ini terjadi saat bank sentral memperbanyak jumlah uang yang beredar. Dengan jumlah uang yang diperbanyak itu diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli masyarakat akan memancing perusahaan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasanya. Dan hal itu diharapkan juga dapat memicu perusahaan menambah lapangan kerja sehingga bisa menekan angka pengangguran. Namun, kebijakan ini harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi inflasi yang tinggi.

2) Kebijakan Moneter Kontraktif Kebijakan moneter ini dikeluarkan apabila kebijakan moneter ekspansif sampai memunculkan efek buruk. Biasanya

---

<sup>14</sup> Nurul Huda, dkk, Pendidikan Ekonomi Makro: *Pendekatan Teoritis*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008), h.175-176.

ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak bisa memicu harga barang-barang menjadi naik. Hal ini bisa memicu terjadinya inflasi, dan hal itu harus segera dikontrol secepatnya. Kebijakan ini kebalikannya dari kebijakan moneter ekspansif. Bank sentral secara perlahan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Bisa kita simpulkan dari pembahasan di atas antara kebijakan fiskal dan moneter, perbedaannya ada di pemegang wewenang dan juga instrumen apa yang diaturnya. Walaupun berbeda, tapi kebijakan fiskal dan moneter bisa dilakukan secara bersamaan dengan melihat masalah dan kebutuhan yang mendesak. Dua kebijakan ini sejak dulu menjadi andalan pemerintah karena sudah terbukti punya hasil yang dapat dipertanggungjawabkan

#### **6. Contoh Kongkrit Kebijakan Moneter dan Fisikal**

Kebijakan moneter di Indonesia ditetapkan oleh Bank Indonesia. Contohnya adalah kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia pada saat Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18 Juni 2015. Dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga Deposit Facility 5,50% dan Lending Facility pada level 8,00%. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk menjaga agar inflasi berada pada sasaran inflasi  $4 \pm 1\%$  di 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dalam kisaran 2,5-3% terhadap PDB dalam jangka menengah.

Bank Indonesia tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial. Pertumbuhan ekonomi pada semester II 2015 di Indonesia diperkirakan membaik, didasarkan pada meningkatnya konsumsi dan investasi pemerintah yang sejalan dengan semakin meningkatnya implementasi proyek-proyek infrastruktur dan meningkatnya penyaluran kredit perbankan. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,0-5,4% pada 2015.

Sedangkan kebijakan fiskal yang diterapkan pada tahun 2015 diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dimana UU tersebut memaparkan mengenai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Pemerintah untuk tahun 2016. Dengan rincian anggaran pendapatan pemerintah pada tahun 2016 sebesar Rp1.822.545.849.136.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus dua puluh dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), didapat dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Dan anggaran belanja untuk tahun 2016 sebesar Rp2.095.724.699.824.000,00 (dua kuadriliun sembilan puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan anggaran Transfeer ke Daerah dan Dana Desa.

Dari uraian tersebut didapat bahwa kemungkinan Indoneisa akan mengalami defisit sebesar Rp273.178.850.688.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga triliun seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu ruiah) yang rencananya akan dibiayai dari pembiayaan anggaran dalam negeri maupun luar negeri. Dengan alokasi anggaran seperti yang tersebut, diharapkan pada tahun 2016 pemerintah mampu menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,0%, menyerap tenaga kerja sebesar 2.000.000.000 orang, menurunkan tingkat Rasio Gini menjadi 0,39, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 70,1.<sup>15</sup>

## Kesimpulan

Kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal ini sangat berperan penting terutama berkaitan dengan peranan dan fungsi uang, sistem moneter dan pengaruh terhadap jumlah uang dan kredit, pengaruh uang dan kredit pada kegiatan ekonomi dan lain-lain. Begitu juga dengan kebijakan fiskal bentuk langkah pemerintah dalam mengelola terhadap pengeluaran dan perpajakan atau dalam penggunaan instrumen fiskal dalam mempengaruhi jalannya sistem ekonomi agar dapat maksimum dalam kesejahteraan ekonomi. Yang memiliki tujuan yang tak

---

<sup>15</sup> Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter Juni 2015, (<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Juni-2015.aspx> Akses pada tanggal 17 September 2021)

lain dalam menggerakkan aktifitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, pemerataan pendapatan. Akan tetapi, dampak kebijakan fiskal pada aktifitas ekonomi negara sangatlah luas.

### Daftar Pustaka

- Al Rafisqy, Zhafran Ghani. Pengertian, Macam, Contoh, serta Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter.
- Anjayati, Himayani. 2015. Makalah Kebijakan, Moneter dan Fiskal, (<http://himayanii.blogspot.co.id/2015/02/makalah-kebijakan-moneter-dan-fiskal.html>, diakses 17 September 2021).
- Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter Juni 2015, (<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Juni-2015.aspx> Akses pada tanggal 17 September 2021)
- Fiskal, B Ananda Bayu Krisna - Kebijakan, and undefined 2020. "Kebijakan Fiskal." *eprints.umsida.ac.id* (n.d.). Accessed September 16, 2021. <http://eprints.umsida.ac.id/6978/>.
- Fiskal, F Ardiansyah - Kebijakan, and undefined 2020. "Kebijakan Fiskal." *eprints.umsida.ac.id* (n.d.). Accessed September 16, 2021. <http://eprints.umsida.ac.id/7010/>.
- Khusen, MS. "Kebijakan Ekonomi(Moneter & Fiskal." *academia.edu* (n.d.). Accessed September 16, 2021. [https://www.academia.edu/download/58097371/TUGAS\\_METLIT\\_ABSTR\\_AK\\_1.pdf](https://www.academia.edu/download/58097371/TUGAS_METLIT_ABSTR_AK_1.pdf).
- M. Natsir, Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan, h.199.
- Nurul Huda, dkk, Pendidikan Ekonomi Makro: *Pendekatan Teoritis*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008), h.175-176.
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi:

*Mikroekonomi dan Makroekonomi*, h.362

Rahayu Ani, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Studi, S Mujiatun - Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan, and Undefined  
2015. "Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam." *jurnal.umsu.ac.id*  
(n.d.). Accessed September 9, 2021.  
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/226>.

Sadono Sukirno. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Raja Gafindo Persada.2003.

Warjiyo, P. *Kebijakan Moneter Di Indonesia*, 2017. Accessed September 16,  
2021.[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Y5rWDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+moneter+p+warjiyo&ots=E\\_t2ifSy-2&sig=j6usPwycZFtuXwLIGd2LtoHj1GY](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Y5rWDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+moneter+p+warjiyo&ots=E_t2ifSy-2&sig=j6usPwycZFtuXwLIGd2LtoHj1GY).

Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter, Teori dan Empirikal* (Jakarta: Kencana, 2011), h.5